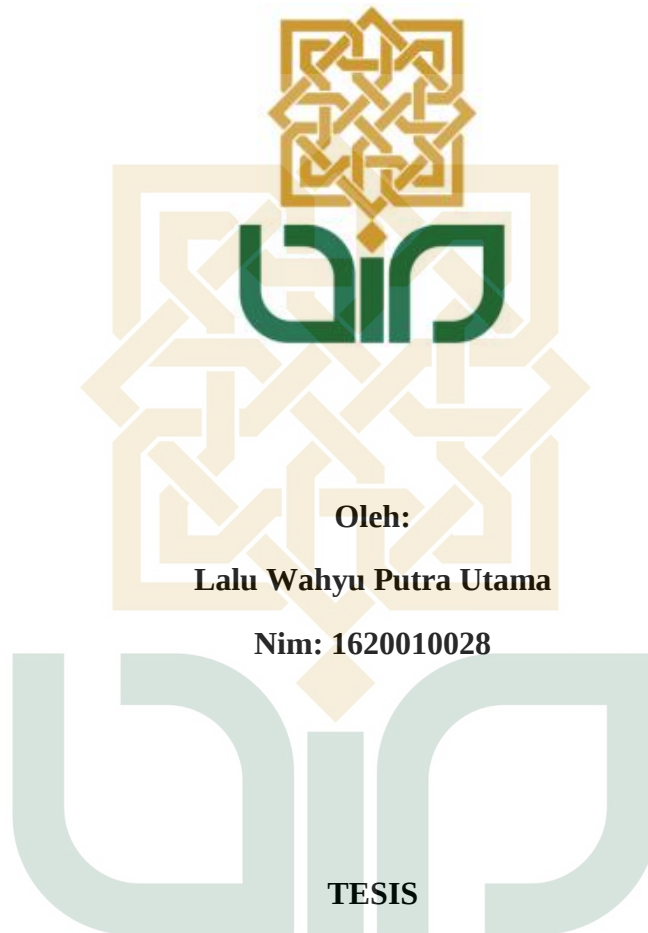


**KEBANGKITAN KELOMPOK ISLAMIS DI MESIR DAN TUNISIA PADA
ERA DEMOKRATISASI PASCA-ARAB *SPRING* 2011-2013**

Studi Kasus Partai FJP Mesir dan Al-Nahdhah Tunisia



Oleh:

Lalu Wahyu Putra Utama

Nim: 1620010028

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A.) Program Studi
Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kajian Timur Tengah**

**YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Judul: Kebangkitan Kelompok Islamis di Mesir dan Tunisia Pada Era Demokratisasi Pasca-Arab Spring 2011-2013: Studi Kasus Partai FJP Mesir dan Al-Nahdhah Tunisia

Proses demokratisasi di Mesir dan Tunisia pasca *Arab Spring* 2011-2013 merupakan momentum bagi elemen masyarakat terlibat dalam partisipasi politik. Proses demokratisasi di Mesir diawali dengan pemilihan parlemen hingga pemilihan presiden. Sementara di Tunisia, proses demokratisasi ditandai dengan pemilihan majelis konstituante. Menariknya, proses demokratisasi di Mesir dan Tunisia menjadi fenomena baru, kalangan islamis yang sebelumnya absen dalam proses penjatuhan rezim mendapatkan suara mayoritas. Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) sayap kanan Ikhwan al-Muslimin mendominasi pemilihan parlemen dan mampu menghantarkan Mohammed Morsi sebagai presiden pertama dalam sejarah Mesir dari kalangan islamis yang dipilih secara demokratis. Di Tunisia partai al-Nahdhah, memperoleh kursi mayoritas pada pemilihan majelis konstituante.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*liberary research*). Jenis dari penelitian yaitu deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengungkapkan fenomena kebangkitan kelompok islamis melalui kemenangan partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) di Mesir dan partai al-Nahdhah Tunisia pada proses demokratisasi pasca-Arab Spring 2011-2013. Selanjutnya peneliti menggunakan beberapa pendekatan untuk mengkaji kemenangan kelompok islamis ini yaitu demokratisasi, islamisme dan pos-islamisme dan gerakan sosial.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebangkitan partai FJP di Mesir dan al-Nahdhah di Tunisia pada proses demokratisasi pasca *Arab Spring* 2011-2013 disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Pertama, gerakan IM dan al-Nahdhah yang mengakar kuat di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial-kemasyarakatan. Untuk mendapatkan dukungan luas masyarakat, IM memperluas jaringannya melalui lembaga sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dan organisasi mahasiswa. Sementara al-Nahdhah memperoleh dukungan masyarakat melalui metode *tabligh*, organisasi mahasiswa dan bantuan dana bagi masyarakat yang disalurkan ke pelosok negeri. Kedua, moderasi partai. Partai FJP dan al-Nahdhah mengusung moderasi, menerima nilai-nilai demokrasi sebagai pondasi negara. wujud dari moderasi FJP dan al-Nahdhah adalah struktur organisasi yang terbuka, dan penerimaannya terhadap konsep negara sipil (*civil state*). Ketiga, aliansi politik, kemenangan partai FJP dan al-Nahdhah karena tergabung dalam aliansi demokrasi.

Kata Kunci: *Arab Spring, demokratisasi, kelompok islamis*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lalu Wahyu Putra Utama
NIM : 1620010028
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 02 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



Lalu Wahyu Putra Utama

NIM: 1620010028

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lalu Wahyu Putra Utama
NIM : 1620010028
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Agustus 2018

Saya yang menyatakan



Lalu Wahyu Putra Utama

NIM: 1620010028

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KEBANGKITAN KELOMPOK ISLAMIS DI MESIR
DAN TUNISIA PADA ERA DEMOKRATISASI
: PASCA-*ARAB SPRING* 2011-2013
Studi Kasus Partai FJP Mesir dan Al-Nahdhah Tunisia

Nama : Lalu Wahyu Putra Utama

NIM : 1620010028

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

Pembimbing/Penguji : Dr. Ibnu Burdah, MA

Penguji : Dr. Sunarwoto, MA.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2018

Waktu : 09.00 – 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 93 / A-

Predikat Kelulusan : Memuaskan / Sangat Memuaskan / Cum Laude*

* Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : KEBANGKITAN KELOMPOK ISLAMIS DI MESIR
DAN TUNISIA PADA ERA DEMOKRATISASI
PASCA-*ARAB SPRING* 2011-2013
Studi Kasus Partai FJP Mesir dan Al-Nahdhah Tunisia
Nama : Lalu Wahyu Putra Utama
NIM : 1620010028
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah
Tanggal Ujian : 15 Agustus 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar *Master of Arts*
(M.A)

Yogyakarta, 20 Agustus 2018

Direktur,


Prof. Noorhaidi, M.A., M.Pd., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KEBANGKITAN KELOMPOK ISLAMIS DI MESIR DAN TUNISIA
PADA ERA DEMOKRATISASI PASCA-ARAB SPRING 2011-2013**

Studi Kasus Partai FJP Mesir dan Al-Nahdhah Tunisia

Yang ditulis oleh:

Nama : Lalu Wahyu Putra Utama, S.Hum
NIM : 1620010028
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Kajian Timur Tengah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diujikan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Kajian Timur Tengah (KTT)

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Yogyakarta, 2 Agustus 2018

Pembimbing



Dr. H. Ibnu Burdah, M.A

KATA PERSEMBAHAN

*Ucapan terimakasih tak terhingga untuk Bunda terinta
Sukmawati, S.pd.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Swt berikan kepada setiap hamba-Nya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada *khatimul anbiya wal mursalin* manusia paripurna Muhammad Saw, melalui ajaran beliau *rahmatan lil alamin* Islam dapat menyebar hingga penjuru dunia, implentasi setiap sendi ajarannya merupakan jalan setapak menuju kesempurnaan iman, intelektual dan peradaban.

Tesis ini berjudul **“Kebangkitan Kelompok Islamis di Mesir dan Tunisia Pada Era Demokratisai Pasca-Arab Spring 2011-2013: Studi Kasus Partai FJP Mesir dan al-Nahdhah Tunisia”** tesis ini di susun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Master of Arts (M.A.).

Dalam proses penelitian, tentu peneliti banyak menemukan kesulitan dan rintangan karena keterbatasan kemampuan peneliti. Namun berkat bimbingan, do’a orang tua dan arahan dari dosen pembimbing, bantuan serta motivasi dari teman-teman, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yudian wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Ro'fah, BSW., dan Dr. Roma Ulinnuha, M.Hum, selaku ketua dan sekretaris Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ibnu Burdah, M.A, selaku pembimbing tesis yang senantiasa meluangkan waktu dan memberi pengarahan serta bimbingan kepada peneliti.
5. Segenap dosen dan karyawan Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS).
6. Kedua orang tua tercinta Sukmawati, dan Lalu Tilar Negara (Alm) dan saudara/i yang saya cintai, Baiq Inggit Sulistiya Ningsih, Baiq Ayu Puspita Rini dan Lalu Muhammad Faizul Fikri
7. KTT Angkatan 2016 dan teman seperjuangan Baiq Uyun Rahmawati dan Rijal Mamdud.

Tentunya masih banyak kekurangan dari penulisan tesis ini, untuk itu peneliti mengharapkan masukan dari pembaca. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama seputar gerakan politik Islam dan Kajian Timur Tengah pada umumnya.

Semoga penulisan tesis ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua pembaca. *Amiin Yaa Robbal 'alamiin.*

Yogyakarta, 2 Agustus 2018

Penyusun

Lalu Wahyu Putra Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR	iv
DEWAN PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretis	10
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan	24
 BAB II SEJARAH PARTAI ISLAMIS DI MESIR DAN TUNISIA	
A. Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP)	26
1. Sejarah Lahirnya Partai FJP di Mesir.....	26
a. Hak Perempuan	28
b. Program Pengentasan Kemiskinan.....	29
2. Doktrin Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP)	30
a. Doktrin Generasi Awal.....	30
b. Doktrin Gerakan Masa Hosni Mubarak (1981-2011) ...	35
c. Doktrin Pasca-Arab Spring	36
B. Partai al-Nahdhah	38
1. Sejarah Lahirnya Partai al-Nahdhah	38

a.	Al-Nahdhah Pada Masa Habib Bourguiba (1957-1987).....	41
b.	Al-Nahdhah Pada Masa Ben Ali (1987-2011).....	42
c.	Momentum Kebangkitan al-Nahdhah.....	44
2.	Doktrin Partai Nahdhah	46
BAB III PROSES DEMOKRATISASI DI MESIR DAN TUNISIA PASCA-ARAB SPRING 2011-2013		
A.	Proses Demokratisasi di Mesir Pasca-Arab Spring	51
1.	Fenomena <i>Arab Spring</i> di Mesir	51
a.	Kegagalan Ekonomi.....	54
b.	Stagnasi Politik	55
2.	Proses Demokratisasi Pasca-Arab Spring di Mesir.....	55
a.	Pemilihan Parlemen 28 November 2011.....	58
a)	Partai Sekuler dan Liberal.....	59
b)	Partai Sayap Kiri	60
c)	Partai islamis	61
d)	Hasil Pemilihan Parlemen	64
b.	Pemilihan Presiden	65
B.	Proses Demokratisasi di Tunisia Pasca-Arab Spring	68
1.	Fenomena <i>Arab Spring</i> di Tunisia	68
a.	Transformasi Politik.....	74
b.	Transformasi Ekonomi.....	76
2.	Proses Demokratisasi Pasca-Arab Spring di Tunisia.....	77
a.	Pemilihan Majelis Konstituante di Tunisia 2011	79
a)	Partai Sekuler dan Liberal.....	81
b)	Partai islamis	82
b.	Hasil Pemilihan Majelis Konstituante 2011.....	83

BAB IV PENJELASAN ATAS KEMENANGAN PARTAI FJP DAN AL-NAHDHAH PASCA-ARAB SPRING 2011-2013

1. Gerakan IM dan al-Nahdhah dan Penetrasinya ke Masyarakat Melalui Aksi Sosial 88
2. Moderasi..... 95
3. Oportunisme Politik 100

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 106
- B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA..... 108

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2011, negara-negara di Timur Tengah dilanda sejumlah peristiwa besar. Peristiwa yang ditandai dengan gelombang aksi massa yang mengharapkan perubahan positif berupa transformasi ekonomi dan politik negara. Rakyat di beberapa negara Arab dari berbagai penjuru bergabung dalam barisan di pusat-pusat kota, menyuarakan aspirasi dan menuntut reformasi birokrasi dan arah negara yang lebih demokratis.¹ Praktik penguasa dan lingkaran elit pemerintahan rezim di Timur Tengah telah banyak merugikan rakyat, korupsi, kolusi dan nepotisme ditambah ketimpangan hukum berdampak pada ketahanan ekonomi dalam negeri. Faktor mendasar inilah melahirkan revolusi dengan tujuan kebebasan, reformasi ekonomi dan demokrasi di Mesir dan Tunisia.²

Gelombang aksi protes massa ini dikenal dengan Musim Semi Arab *The Arab Spring* atau *Rabi' al-Arabi* yaitu sebuah peristiwa luar biasa dalam kehidupan internasional fase abad-21 yang diprakarsai oleh kalangan sekuler. Kurangnya legitimasi politik, ditambah dengan tindakan represi, krisis ekonomi dan permasalahan negara yang belum terselesaikan menciptakan gelombang demonstrasi.

¹ Mark L. Hass, David W. Lesch, *The Arab Spring: Change and Resistance in the Middle East* (United State, Westview Press, 2017), 1-3.

² Vera Van Hullen, *EU Democracy Promotion and The Arab Spring: International Cooperation and Authoritarianism* (New York: Palgrave Macmillan, 2015), 145.

Aksi protes di beberapa negara Arab menyebabkan konfrontasi antara demonstran dan militer. Dinamika ini terjadi karena kekerasan pada wilayah di mana secara geografis didominasi oleh kelompok pemuda yang menggunakan kekuatan sipil (*civilian based power*) dalam menggerakkan massa.³

Menurut Ibnu Burdah revolusi di beberapa negara Arab berakar pada persoalan pengangguran, kemiskinan, belenggu kekuasaan dan kekuatan militer yang telah berlangsung puluhan tahun. Masyarakat telah menyadari tentang realitas politik dan sosial di negeri mereka jauh dari harapan. Maka, perubahan ke arah lebih baik menjadi prioritas utama bagi setiap individu.⁴ Realitas sosial dan politik tersebut akhirnya menyulut gerakan protes massa di seluruh negeri dan dilakukan dengan damai, serta tanpa intervensi negara Arab besar lain ataupun kekuatan Barat. Aksi protes yang lahir murni dari masyarakat bawah, bukan *desain* elit militer.

Aksi damai rakyat di berbagai negara, nyatanya dibalas kekerasan oleh pasukan keamanan, mengakibatkan konfrontasi, polarisasi dan fragmentasi politik regional. Pada bulan Januari-Februari 2011, demonstrasi di Tunisia⁵ dan Mesir berhasil

³ Christopher L. Brennan, *Fall of The Arab Spring From Revolution to Destruction* (San Diego: Progressivpress, 2015), 8.

⁴ Ibnu Burdah, *Menuju Dunia Baru Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 19-23.

⁵ Tunisia merupakan awal lahirnya peristiwa *Arab Spring*. Revolusi Yasmin dimulai pada 17 Desember 2010, Mohamed Bouazizi, seorang pedagang berusia 26 tahun melakukan aksi bakar diri akhirnya memicu revolusi. Tindakan bunuh diri bukan hanya sebagai ekspresi dari penderitaan tragisnya atas kondisi kaum pemuda yang terpinggirkan, terasing, menjadi pengangguran walaupun berpendidikan dan memiliki keterampilan. Aksi tersebut menjadi aksi protes di daerah-daerah tertinggal di wilayah selatan dan akhirnya pada minggu kedua bulan Januari, demonstrasi menyebar hingga di pinggiran koa Tunisia. Upaya penyebaran masif aksi protes didorong oleh media sosial dalam mengatur dan mengkoordinasikan massa. lihat. Mark L. Haas, David W. Lesch, *The Arab Spring: Change and Resistance in The Middle East* (United State: Westview Press, 2013), 16-17.

menggulingkan rezim. Di Tunisia, setelah didesak rakyat, Zine El Abidine Ben Ali mengundurkan diri pada Januari 2011. Adapun di Mesir, pemerintah juga gagal mengendalikan demonstran setelah sebelumnya menawarkan konsesi, sehingga mengambil langkah dengan menindak keras pemrotes. Sebuah titik balik datang pada saat tentara Mesir mengumumkan menolak menggunakan kekerasan pada demonstran. Selama delapan belas hari melakukan aksi di berbagai penjuru kota dan pusatnya di Tahrir Square, akhirnya Husni Mubarak mundur dari jabatan presiden setelah berkuasa selama hampir 30 tahun.

Menurut Kristen J. Fisher, demonstrasi populer yang dimulai pada 2010-2011, mengantarkan Timur Tengah pada tatanan baru yang dibangun di atas pertarungan antara solidaritas Arab hingga terjadi kesepakatan antara aktor negara dan masyarakat, terbukti ketika rakyat Tunisia dan Mesir menantang peraturan otoriter di alun-alun ibukota, secara efektif membangkang argumen lama yang dibuat rezim dalam membenarkan peraturan otoriter, rakyat mengungkapkan komitmen terhadap demokrasi, prosedur keadilan sosial dan kebebasan.⁶ Cara demonstran tanpa kekerasan menuntut agar para pemangku kebijakan bertanggung jawab atas perbuatan masa lalu, mewujudkan etos demokrasi baru yang tercermin dalam slogan demonstrasi diseluruh negeri yaitu rakyat menginginkan rezim turun (*as-sya'b yuridu isqat al-nizam*) gilirannya, memiliki implikasi mendalam tentang bagaimana keadilan

⁶ Kristen J. Fisher, Robert Stewart, *Transitional Justice and The Arab Spring* (New York: Reutledge, 2014), 19-20.

transisional dimainkan, sebagai proses di mana individu dan kelompok merasakan jalan mereka menuju sebuah partisipasi politik dan menuju perbaikan masyarakat.

Keberhasilan rakyat Mesir dan Tunisia melawan rezim despotik menandai fajar sejarah baru bagi dua negara tersebut. Secara pasti, lembaga transisional sementara mempersiapkan prosedur pemilihan umum baik dalam tingkat parlemen, majelis konstituante dan pemilihan presiden. Proses demokratisasi sekaligus membuka peluang bagi semua kalangan yang ingin berpartisipasi dalam persaingan perebutan kekuasaan. John L. Esposito menjelaskan bahwa fenomena demonstrasi di Mesir dan Tunisia murni adalah cita-cita kebebasan dan kesetaraan sebagai simbol demokrasi dan bukan atas motif agama. Terbukti melalui sebuah survei yang dilakukan pada 1.201 warga Tunisia dan 4.080 warga Mesir periode pasca *Arab Spring* 2011 menunjukkan hanya 26 % dan 28 % meyakini bahwa Islam harus memainkan peran dalam pemerintahan. Bahkan banyak warga Tunisia mempercayai agama seharusnya tidak berperan aktif dalam ruang publik. Sebesar 78,4 % meyakini kalangan religius harusnya tidak terlibat dalam urusan politik negara, sedangkan hanya 30,6 % meyakini Tunisia akan lebih baik jika agama berperan. Bahkan survei lain mengungkapkan 78,4 % responden setuju dengan pernyataan agama adalah masalah pribadi yang harus dipisahkan dari kehidupan sosial dan politik, karena mayoritas masyarakat 94 % percaya terjadinya revolusi akan memberikan peluang ekonomi

lebih baik dan meningkatkan kemakmuran masyarakat dan menghapus otoritarianisme.⁷

Berbeda dengan hasil survei, momentum *Arab Spring* dan proses demokratisasi di Mesir dan Tunisia mencatat sejarah baru ditandai dengan bangkitnya partai-partai Islam. Pada tahun 2012 partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) sayap politik Ikhwanul al-Muslimin memenangkan sekitar 47 % kursi di parlemen sejak penggulingan Husni Mubarak.⁸ FJP memenangkan 235 kursi pada Majelis Rakyat dan mengamankan 127 kursi parlemen dalam daftar partai. Bahkan Mesir menciptakan sejarah baru, untuk pertama kalinya dipimpin kalangan islamis secara demokratis, dipilih secara langsung oleh rakyat Mesir. Mohammed Morsi memenangkan pemilihan presiden mengalahkan rivalnya Ahmed Shafiq dengan prosentase 51.7 % dan 48, 3 %.⁹

Adapun di Tunisia, partai al-Nahdhah (Kebangkitan) memenangkan pemilihan Majelis Konstituante dengan 41.5 %. Al-Nahdhah memperoleh 90 kursi dari 217 kursi parlemen yang diperebutkan, mengalahkan partai sekuler *Congress of Republic* (CPR) sebagai *runner-up* dengan kemenangan 14 % dan mendapatkan 30 kursi dalam parlemen.¹⁰ Kemenangan al-Nahdhah akan mempengaruhi arah politik negara, menunjuk seorang presiden dan membentuk pemerintahan sementara. Begitu juga

⁷ John L. Esposito, Tamara Sonn, John O. Voll, *Democracy After Arab Spring* (New York: Oxford University Press, 2016), 189-191.

⁸ David D. Kirkpatrick, "Islamists Win 70 % of Seats in the Egyptian Parliament", <http://www.nytimes.com>. Diakses tanggal 20 Januari 2018.

⁹ Abdel Rahman Hussein, "Muslim Brotherhood's: Mohammed Morsi declared president of Egypt: Egyptians celebrate while neighbours with guarded optimism to appointment of first elected Islamist candidate", <https://www.theguardian.com>, Diakses tanggal 20 Januari 2018.

¹⁰ "Tunisia's Islamist Ennahda party wins historic poll", <http://www.bbc.com/news/world-africa>. Diakses tanggal 20 Januari 2018.

dengan pemilihan yang dilakukan pada bulan Maret 2013 tetap mendapatkan dukungan kuat walaupun sebagai *runner-up* 20 % suara dan kalangan sekuler Partai *Nida Tunis* (NTP) menang dengan perolehan 25 %.¹¹

Kebangkitan partai Islamis di Mesir dan Tunisia menjadi sejarah baru. Pasca terjadinya *Arab Spring* 2011-2013, kemenangan mutlak bagi partai islamis Kebebasan dan Keadilan (FJP) pada pemilihan parlemen dan sekaligus menghantarkan pimpinan partai Mohammed Morsi dari Ikhwan al-Muslimin (IM) sebagai presiden pertama terpilih dalam sejarah Mesir dan mengalahkan lawan politiknya baik dari sayap kiri, liberal dan sekuler. Hal yang sama terjadi di Tunisia, partai al-Nahdhah berhasil memegang kendali setelah mendapatkan kursi mayoritas pada pemilihan pertama yang berlangsung pada 2011.

Oleh sebab itu, fenomena kebangkitan partai islamis FJP di Mesir dan al-Nahdhah di Tunisia pasca *Arab Spring* 2011-2013 menarik peneliti untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam sebab kemenangan partai islamis di Mesir dan Tunisia adalah suatu anomali dan janggal, fakta dilapangan menunjukkan kalangan islamis tidak banyak berperan bahkan absen dalam proses penjatuhan rezim.

¹¹ Duncan Pickard, "Electoral Politics Under Tunisia's New Constitution, Rafik Hariri Center for the Middle East: Atlantic Council", https://www.files.ethz.ch/isn/166942/tunisia_new_constitution_dpickard.pdf. Diakses tanggal 20 Januari 2018.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa di tengah proses demokratisasi di Mesir dan Tunisia partai islamis FJP dan al-Nahdhah mampu bangkit padahal tidak berperan dalam proses penjatuhan rezim ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara terperinci fenomena kebangkitan kelompok Islamis di Mesir dan Tunisia pada proses demokratisasi 2011-2013. Kemenangan partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) di Mesir dan al-Nahdhah di Tunisia pasca Arab Spring adalah suatu anomali sebab Musim Semi Arab yang melanda Mesir dan Tunisia merupakan murni diprakarsai oleh kalangan pekerja dan pemuda dengan harapan dan cita-cita perbaikan ekonomi dan politik negara. Setelah rezim kuasa di Mesir dan Tunisia mampu tumbang oleh rakyat, proses transisi dan demokratisasi berlangsung lancar dan terkendali. Proses demokratisasi di dua negara tersebut, melahirkan aktor baru dengan kemenangan partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) Mesir dan al-Nahdhah Tunisia. Kemenangan partai Islam merepresentasikan kebangkitan kelompok Islamis yaitu Ikhwan al-Muslimin dan gerakan al-Nahdhah. Maka, penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kebangkitan partai Islamis FJP Mesir dan al-Nahdhah Tunisia pada proses demokratisasi pasca-Arab Spring 2011-2013.

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan peninjauan kembali terhadap beberapa penelitian, ada beberapa penelitian yang berkaitan seputar demokrasi, gerakan politik Islam dan *Arab Spring* di Timur Tengah yaitu antara lain:

Penelitian Muhammad Fakhry Ghafur dengan judul *Problematika Kekuatan Politik di Yaman, Suriah dan Aljazair*.¹² Penelitian mengkaji dinamika kultural dan politik di Yaman, Suriah dan Aljazair. Dinamika kultural dan politik Islam memiliki visi mendirikan negara sesuai dengan nilai-nilai Islam, sejak lama Islam sebagai pengobar semangat anti kolonialisme. Hasilnya, di Yaman muncul kekuatan Ikhwan al-Muslimin dengan partai *islah* dan didukung oleh kalangan Salafi. Di Suriah memunculkan kelompok Salafi. Adapun di Aljazair lahir Front Penyelamat Islam (*Front Islamiqu de Salut-FIS*) dan Front Kemerdekaan Nasional (*Front de Liberation Nationale-FLN*) kerap menggunakan kekuatan pemersatu Islam untuk memperkuat barisan nasional dalam melawan penjajah.

Penelitian dengan judul *Problematika Politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia* oleh Nostalgiaawan Wahyudhi.¹³ Penelitian ini membicarakan tentang peran partai Islam di tiga negara yaitu Maroko, Sudan dan Somalia. Politik Islam mendapatkan dukungan dari kalangan bawah dan berperan secara signifikan. Ada

¹² Muhammad Fakhry Ghofur, "Problematika Kekuatan Politik Islam di Yaman, Suriah dan Aljazair", *Jurnal Politik Islam.*, Vol 12, No. 2 (Desember 2015)

¹³ Nostalgia Wahyudhi, "Problematika Kekuatan Politik Islam di Maroko, Sudan dan Somalia", *Jurnal Penelitian Politik.*, No. 2, (Desember 2016).

empat kelompok Islam politik yang memiliki orientasi dan ideologi yang berbeda-beda di Maroko, yakni kelompok *Jama'ah al-Adl wal Ihsan (Justice and Charity)* kelompok, *Hizb al-Adalah Wal-Tanmiyya (The Party for Justice and Development)* partai yang merupakan gabungan antara organisasi Islam moderat dan kelompok pendukung kerajaan, kelompok radikal *Salafiya Jihadiya* bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dan kelompok *Sufi Zaouiya Boutchichia* berasal dari kelompok religius pendukung kerajaan. Sementara politik Islam di Sudan dan Somalia mengalami pasang surut, antara tokoh Turabi (ICF/NIF/PCP), Mighrani (NUP/DUP) dan Sadiq al-Mahdi dari *Umma Party*. Adapun partai Islam di Somalia tidak mendapat dukungan disebabkan perkembangan iklim intelektual yang belum berkembang.

Adapun penelitian yang mengkaji tentang *Arab Spring*, termasuk penelitian yang tidak sedikit, baik berupa disertasi, skripsi dan jurnal. Di antaranya penelitian dengan judul *Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi Timur Tengah* oleh Shafira Inanda Yasmine.¹⁴ Penelitian ini mengkaji secara umum bagaimana hubungan antara agama dan demokrasi serta prospek demokrasi dalam konteks *Arab Spring* di Timur Tengah. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa para umumnya diperlukan separuh dekade agar sebuah rezim dapat berkonsolidasi dengan masyarakat secara stabil. Selain upaya sekularisasi politik menjadi besar, dan Islam mulai bertransformasi lebih fleksibel terhadap demokrasi, namun proses negosiasi peranan

¹⁴ Shafira Inanda Yasmine, "Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi Timur Tengah", *jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, No. 2, 2015.

normatif agama dalam politik merupakan subjek yang sifatnya emosional dan sensitif serta berhubungan langsung dengan isu personal dan identitas kelompok.

Penelitian dengan judul *Masyarakat Sipil dan Transisi Demokrasi di Timur Tengah* oleh Humphrey Wangke.¹⁵ Penelitian ini membahas secara singkat tentang keberhasilan dan kegagalan akibat *Arab Spring*. Konflik horizontal dan vertikal telah mengubah kondisi negara otoriter seperti Libya, Suriah dan Yaman dalam melakukan perubahan karena masyarakat sipil yang tersegmentasi dalam bentuk sektarian atau suku yang kerap kali tumpang tindih dengan pembagian ekonomi. Dalam transisi demokrasi di beberapa negara seperti Tunisia, masyarakat sipil mempunyai peran penting dalam memajukan partisipasi politik rakyat, masyarakat sipil mampu membatasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan, serta mengekspos penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat sipil di Tunisia telah berpartisipasi dalam sebuah proses yang secara berkelanjutan menekankan pentingnya kemerdekaan, demokrasi, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial. Transisi demokrasi di Tunisia dinilai berhasil dan telah membentuk komite khusus bertugas menangani masalah-masalah keamanan, korupsi, dan rekonsiliasi. Tunisia menjadi negara pertama merasakan pentingnya peran organisasi masyarakat sipil dalam hubungannya dengan negara-masyarakat dan berbagai aktivis sipil.

¹⁵ Humphrey Wangke, "Masyarakat Sipil dan Transisi Demokrasi di Timur Tengah", P3DI Setjen DPR RI, No. 3, (Februari 2014).

E. Kerangka Teoretis

Untuk menjelaskan fenomena kebangkitan partai Islamis FJP di Mesir dan al-Nahdhah Tunisia pada proses demokratisasi 2011-2013, dibutuhkan teori relevan dan komprehensif untuk menjelaskan fenomena kebangkitan kelompok Islamis di Mesir dan Tunisia. Ada tiga aspek penting dalam memahami kebangkitan partai Islam FJP dan al-Nahdhah pada proses demokratisasi yaitu: Pertama, kemenangan mutlak bagi partai FJP, partai sayap kanan Ikhwan al-Muslimin yang dibentuk pasca *Arab Spring*. Sementara partai al-Nahdhah bersumber dari akar gerakan al-Nahdhah Tunisia yang telah berkiprah pada masyarakat Tunisia. Kedua, proses demokratisasi yang mencerminkan peta kekuatan politik pada tingkat pemilihan parlemen, majelis konstituante dan pemilihan presiden. Ketiga, kemenangan partai FJP Mesir dan al-Nahdhah Tunisia tidak lepas dari akar gerakan kelompok yang menarik kuat pada masyarakat. Oleh sebab itu, ada beberapa teori yang peneliti gunakan untuk memahami fenomena kebangkitan kelompok Islamis melalui partai FJP di Mesir dan partai al-Nahdhah Tunisia pada era demokratisasi pasca *Arab Spring* 2011-2013 yaitu:

1. Demokratisasi

Teori demokratisasi difokuskan pada faktor utama yang menyebabkan munculnya demokrasi. Sebagian besar penjelasan tentang demokratisasi memanfaatkan tiga pendekatan yang berbeda yaitu teori modernisasi, sosiologi historis (strukturalisme) dan teori transisi dan terkadang hanya dibedakan dari pendekatan strukturalis dan

pendekatan transisi karena masing-masing pendekatan memiliki perbedaan yang jelas. Oleh sebab itu, agar pendekatan yang digunakan lebih terukur dan terarah maka peneliti menggunakan pendekatan transisi untuk melihat proses demokratisasi sebagai sebuah transisi sistem otoritarianisme ke sistem demokratis seperti yang terjadi di Mesir dan Tunisia.

Demokratisasi dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan rezim politik dari sistem negara yang non-demokratis ke sistem demokratis, dari pemerintahan yang otoriter menuju pemilihan umum, dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Proses demokratisasi akan tercapai apabila memenuhi empat hal yaitu setiap warga negara diberikan hak partisipatif dalam pemilihan umum, kebebasan berpolitik, keadilan yang sama di hadapan hukum dan terciptanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Menurut Schmitter menjelaskan demokratisasi adalah transisi dari sistem otoriter ke demokrasi konsolidasi. Pada prosesnya terjadi interaksi, tawar-menawar antara pemimpin otoriter dan oposisi demokratik. Keberhasilan proses transisi sistem politik bergantung pada kesepakatan antara para elit, termasuk pergantian pemimpin otoriter karena kunci keberhasilan yang mengarah pada pembentukan prosedur demokratis pemerintahan adalah melalui konsolidasi antara pemerintah dan masyarakat serta bagaimana terciptanya sistem demokratis.¹⁷ Sementara Robert A. Dahl¹⁸

¹⁶ Rossel J. Dulton, Doh C. Shin, Willy Jou, *Understanding Democracy: Data from Unlikely Places*, No. (4 October 2007).

¹⁷ *Ibid*, 58.

demokratisasi ditopang oleh tujuh pilar, yaitu pemilihan pejabat yang bebas dan adil, pemilihan umum, hak pilih inklusif, hak untuk mencalonkan diri sebagai pejabat, kebebasan berekspresi, informasi alternatif yang dilindungi oleh hukum dan otonom yang bersifat asosiasional (*associational autonomy*).¹⁹

Sementara menurut David Potter menjelaskan demokratisasi merupakan sebuah gerakan dari pemerintahan yang kurang bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab, dari pemilihan yang kurang kompetitif pada pemilihan yang lebih bebas dan adil, dari keadaan hak-hak sipil terbatas hingga perlindungan politik dengan baik, dari asosiasi otonom masyarakat sipil terbatas dan asosiasi masyarakat lebih banyak. Bisa dipahami demokratisasi adalah proses evolusi progresif dari beberapa elemen yaitu akuntabilitas, pemilihan umum, hak sipil dan politik, asosiasi otonom didukung oleh lembaga-lembaga negara, pembangunan ekonomi, menghindari perpecahan dalam masyarakat, adanya budaya dan ide-ide politik serta menunjukkan sebuah negara di mana hampir semua warga dapat memilih secara bebas atau terjaminnya kebebasan sipil secara substansial.²⁰

Dalam ruang lingkup lebih mendasar, Abu Jaber menjelaskan pemilihan umum dan pemilihan secara bebas adalah komponen dasar dari demokrasi dan harus

¹⁸ Amin Saikal, Albrecht Schnabel, *Democratization in the Middle East: Experiences, struggles, challenges* (USA: United Nations University Press, 2003), 6.

¹⁹ Otonomi asosiasional dalam terminologi Dahl diartikan sebagai orang yang berasal dari komunitas kecil, lemah secara politis bisa mendapatkan kekuatan politik lebih besar. Sementara kalangan elit memberikan kesempatan untuk mengendalikan, mengontrol dan memobilisasi anggotanya. Lihat, pro Bono Statistics, "Review of Dahl's On Political Equality, Part 11: The political institutions of representative democracy", diakses melalui: <https://probonostats.wordpress.com>. 24 Februari 2018.

²⁰ Ibid.

ditingkatkan oleh institusi pemerintah, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan yang diabadikan secara konstitusional, pluralisme dan kebebasan individu menjadi konsep dasar yang berfungsi sebagai dasar mengembangkan masyarakat yang lebih liberal, pluralis, toleran dan stabil.²¹ Demokratisasi digambarkan sebagai upaya persaingan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem politik. Terjalannya kompetisi yang sehat di antara partai politik, terwujudnya nilai-nilai demokrasi melalui sistem multi partai dan berkelanjutan serta diberikan kebebasan berserikat dan berekspresi bagi setiap warga negara.²²

Tercapainya proses demokratisasi dalam suatu negara dapat ditentukan oleh beberapa hal, pertama perubahan institusional atau sistem (*institutional change*). Perubahan institusional mencakup pembentukan pemilihan (*setting elections*), perkembangan sistem partai, serta hubungan antara eksekutif dan legislatif. Penyelenggaraan pemilu yang demokratis telah dilihat sebagai tanda-tanda pertama demokratisasi dan beberapa kasus adalah langkah pertama dalam penciptaan demokrasi baru. Pengenalan pemilihan multi-partai yang bebas dan kompetitif. Kedua sistem politik partai yang didukung oleh politik regional, semakin banyak partai politik maka demokratisasi akan semakin berhasil dan sistem parlementer akan memberikan peran konstitusional yang lebih besar kepada partai-partai dan

²¹ *Ibid.*, 7.

²² Masatoshi Kisaichi, *Popular Movement and Democratization in Islamic World* (USA: Routledge, 2006), 161.

mendukung pengembangan sistem partai yang stabil. Ketiga, kepemimpinan politik, presidensial dan sistem parlementer. Demokrasi berarti menetapkan batasan konstitusional pada kekuatan pemimpin politik. Konstitusi demokratis mengkodifikasikan mekanisme pemilihan pemimpin baru, serta hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik²³

Demokratisasi memungkinkan masyarakat yang terpecah membangun kembali rasa solidaritas-prasyarat mengatasi budaya kekerasan dan mengembangkan budaya perdamaian dan kerjasama. Proses demokratisasi dalam masyarakat terutama pasca-konflik didasarkan pada kompromi dan kerjasama antara oposisi dan pihak pendukung hingga tercapai rekonsiliasi dan monuver politik yang efektif dan sukses. Sistem demokrasi akan berimplikasi pada legitimasi, inklusivitas, fleksibilitas dan kapasitas yang memungkinkan konflik dikelola secara damai.²⁴

Proses *Arab Spring* yang terjadi di Mesir dan Tunisia membuka jalan proses demokratisasi, pemilihan umum berjalan dengan baik, setiap warga dapat menyuarakan aspirasi melalui pemilihan yang bebas dan terbuka. Proses pemilihan umum yang bebas dan terbuka merupakan bagian dari jalannya proses demokratisasi.

2. Islamisme

a. Islamisme

²³ Jean Grugel, *Democratiation*, 68-71.

²⁴ Amin Saikal, Albrecht Schnabel, *Democratization*, 29-30.

Pada dasarnya, pemahaman tentang islamisme dominan dikaitkan dengan pengalaman historis, berupa pesan kesejarahan yang telah memberikan pola ideal dan pengaruh berkelanjutan. Pengalaman historis dinyatakan melalui teks suci yang menekankan fakta-fakta peradaban bangunan Islam, terutama landasan institusi negara.²⁵ Akan tetapi, pemaknaan islamisme dari presisi gerakan dan ideologi selanjutnya berhubungan dengan peristiwa-peristiwa besar dan fenomena diskursif yang memiliki konotasi dengan pemaknaan negatif lain seperti fundamentalisme Islam²⁶ dan revivalisme dan kadang-kadang disamakan dengan terminologi tradisional, militan dan konservatif.²⁷ Terminologi ini muncul karena ada beberapa konsep yang secara distingtif dikelompokkan kedalam proyeksi negara (*dar al-Islam*) serta peperangan (*dar al-harb*).²⁸

Pemahaman ini dikembangkan dalam kerangka kerja tertentu berhubungan dengan pola sosial, politik dan sejarah. Istilah islamisme merujuk pada beberapa hal, pertama politik Islam merupakan aktivitas organisasi dan gerakan yang bertujuan untuk memobilisasi dan mengagitasi ranah politik dengan bersumber pada simbol dan tradisi Islam. kedua, islamisme muncul dari diskursus hubungan antara agama dan

²⁵ John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern*, Penterjemah: Ajat Suderajat (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 27.

²⁶ Istilah fundamentalisme Islam memiliki makna cenderung negatif karena kadang-kadang melakukan pemaksaan, kekerasan dan aksi terorisme. Contoh riil dari gerakan fundamentalisme Islam adalah rezim Taliban Afghanistan, yang dibentuk oleh masyarakat Pashtun pada tahun 1994, tujuan mereka mendirikan negara Islam dan menentang imperialisme Barat, mereka tidak bermain musik, tidak memilih dan membatasi hak wanita. Lihat. Cory Gunderson, *Islamic Fundamentalism* (United States: Abdo Pub Co, 2004), 25.

²⁷ Salwa Ismail, *Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism* (New York: I.B Tauris, 2006), 1.

²⁸ Sohail H. Hashmi, *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict* (Princeton: Princeton University Press, 2002), 44.

modernitas. Konsep ini berada pada dua arah jika Islam dipahami tidak sesuai dengan modernitas, maka Islam mengekspresikan penolakan terhadap modernitas, di sisi lain, jika Islam tidak bertentangan dengan modernitas, maka islamisme dipahami sebagai bagian integral dari modernitas. Penolakan Islam terhadap modernitas terutama berkaitan dengan sekularisme, upaya pemisahan antara agama dan negara atau agama mengalami kemunduran.²⁹ Ketiga, doktrin suci (*inerrancy*) totalitas kitab suci yang memiliki kebenaran absolut.³⁰

Pandangan ini diperkuat melalui argumentasi Annete Ranko, menjelaskan bahwa untuk memahami islamisme terdapat dua pendekatan dalam memahami esensi dari islamisme yaitu pertama, gagasan Islam sebagai sebuah kesatuan, agama dan negara memiliki hubungan yang erat (*inseparability*). Tujuannya digambarkan tidak lain penegasan kembali terhadap gagasan historis yang terus berlanjut dan sebagai upaya menjaga keaslian tradisi Islam. Kedua, anggapan bahwa Islam selalu mengalami keterasingan sosial, subordinasi dan isolasi sehingga negara telah mengalami kegagalan termasuk dalam konteks Timur Tengah, pemerintah telah gagal mewujudkan pembangunan ekonomi, menjamin hak dan kebebasan politik serta

²⁹ Naser Ghobadzadeh, *A Theological Challenge to the Islamic State* (New York: Oxford University Press, 2015), 21.

³⁰ Mukhsin Jamil, *Revitalisasi Islam Kultural: Arus Baru Relasi Agama dan Negara* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 77.

pembangunan ekonomi sehingga Islam menjadi satu-satunya solusi menciptakan pemerataan, menjamin hak setiap warga dan terjaminnya stabilitas ekonomi.³¹

Sementara Salwa Ismail memaparkan term islamisme meliputi dua hal, yaitu politik Islam dan proses re-islamisasi. Politik Islam mengacu pada sebuah aktivitas organisasi dan gerakan yang memaksakan kehendak, menyebarkan simbol tradisi Islam. Keharusan menerapkan simbol Islam sebagai ideologi politik yang diartikulasikan pada sebuah gagasan harapan mendirikan pemerintah Islam, dipahami sebagai pemerintahan menerapkan hukum Islam (*syari'at*). Sementara islamisasi atau re-islamisasi menandakan agenda menuju lingkungan sosial islami. Hal itu, mencakup proses beberapa wewenang dalam kehidupan sosial melalui tanda dan simbol yang berhubungan dengan tradisi Islam. Bagaimanapun, proses islamisme adalah upaya politik atau identitas politik masyarakat Muslim yang berbeda dengan gerakan dan ideologi politik lain.³²

Pandangan dan asumsi Salwa Ismail didasarkan pada pandangan fundamentalis lainnya, seperti Sayid Qutb, Muhammad Rashid Ridha, Maulana al-Maudidi dan Muhammad Abduh. Menurut Abduh, misalnya, mengatakan bahwa Islam adalah agama dan syariat. Syariat tidak dapat tegak sempurna tanpa otoritas politik untuk menerapkan keputusan-keputusan hukum dan memelihara ketertiban umum karena

³¹ Annete Ranko, *The Muslim Brotherhood and its Quest for Hegemony in Egypt: State-Discourse and Islamist Counter-Discourse* (Germany: Springer VS, 2015), 18-19.

³² Frederic Volpi, *Political Islam: A Critical Reader* (New York: Routledge, 2011), 17.

hukum adalah prasyarat rasional kehidupan sosial yang tertib, yang menunjukkan adanya integrasi moral dan kebudayaan suatu masyarakat.³³

Pandangan tersebut sejalan dengan ideologi gerakan partai yang bersumber dari Ikhwan al-Muslimin (FJP) di Mesir. Lengsernya Husni Mubarak dan upaya demokratisasi menciptakan kesempatan bagi pergerakan IM (FJP) yang sejak lama terlibat secara politik praktis yang berlandaskan pada pemikiran fundamentalis, menerapkan secara total nilai-nilai monoteistik. Kesempatan itu tercipta dengan (FJP) dan kemenangan Mohammed Morsi sebagai presiden mewakili seluruh elemen IM.

b. Pos-islamisme

Menurut Asef Bayat, pos-islamisme merupakan pemahaman bahwa Islam mampu beradaptasi dan inheren dengan demokrasi dan mengklaim bahwa Islam adalah sebuah agama yang pluralis, adil, dan berwatak demokratis. Kesatuan Islam dengan demokrasi menguatkan nilai-nilai kemanusiaan yang berimplikasi pada kesatuan, kesetaraan, ras, gender, dan kebebasan memilih. Kedaulatan yang dianugerahkan Tuhan kepada umatnya mendasari pemerintahan yang demokratis dengan konsep pluralisme dan perbedaan.³⁴ Lebih jauh, pos-islamisme adalah sebuah upaya reformasi mengimplementasikan sebuah kekuasaan penuh toleransi dan terutama demokrasi dalam kerangka konstitusi yang ada.

³³ Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 168-169.

³⁴ Asef Bayat, *Post-Islamisme*, Pentj. Faiz Tajul Milah (Yogyakarta: LkiS, 2011), 5-8.

Searah dengan pandangan di atas, Ugur Komecoglu menguraikan bahwa pos-islamisme dapat dipahami sebagai sebuah kondisi dan proyeksi politik yang sedang berlangsung ditandai dengan adanya kebebasan, demokrasi dan modernitas keagamaan.³⁵ Pos-islamisme adalah upaya sadar untuk mengkonseptualisasikan dan menyusun strategi dasar pemikiran serta modalitas untuk melampaui islamisme di ranah sosial, politik, dan intelektual. Bukan berarti post-islamisme anti-Islam atau tidak islami bahkan sekuler, melainkan merupakan upaya memadukan religiusitas dengan hak asasi, keimanan dengan kebebasan, dan berusaha untuk mengubah prinsip-prinsip dasar islamisme dengan menekankan hak dan pluralitas sebagai pengganti otoritas tunggal, mengedepankan historitas daripada teks suci dan memikirkan masa depan bukan bersandar pada masa lalu.³⁶ Dengan demikian, konsep ini ingin menggabungkan Islam dengan pilihan pribadi dan kebebasan dengan demokrasi.

Dalam konteks proses demokratisasi dan dominasi, partai Islam melahirkan post-islamisme, hal tersebut dapat dilihat dari fenomena *Arab Spring*, Tunisia dan Mesir adalah contoh baik dari revolusi dan transformasi menuju negara yang lebih demokratis. Dominasi al-Nahdhah menjadi partai dominan dapat menentukan arah politik negara, partai islamis dapat bersinergi dengan proses demokrasi, pemilihan, hak asasi dan kebebasan dalam berekspresi terbuka bagi setiap kalangan.

³⁵ Ugur Komecoglu, *Islamism, "Post-islamism and Civil Islam"*, <https://www.hudson.org>. Diakses 30 Januari 2018.

³⁶ Asef Bayat, *Islam and Demokrasi: What is The Real Question?* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), 19.

Keberhasilan demokrasi di Tunisia menandai perubahan arah intern ideologi partai al-Nahdhah, ia tidak lagi memainkan visi dan misi mendirikan cita-cita reformis-fundamentalis sebelumnya yang ingin mendirikan negara berlandaskan syari'at, melainkan mempertahankan nilai-nilai Islam dalam konteks demokrasi. Partai islamis FJP dan al-Nahdhah berupaya melakukan interaksi dan menawarkan interaksi antara nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam menciptakan keadilan dan akuntabilitas. Dengan kata lain, dominasi kalangan islamis pada proses transisi di Mesir dan Tunisia bisa dikatakan menyediakan lingkungan sosial yang kondusif serta sebagai paradigma alternatif di mana doktrin *wasatiyyah* menawarkan solusi persoalan berkenaan dengan spektrum sosio-politik yang lebih besar.

3. Gerakan Sosial (*Social Movement*)

Pendekatan awal dalam mempelajari gerakan sosial berasal dari fungsionalisme tentang perilaku massa. Pijakan awal pendekatan ini adalah sebuah asumsi adanya sistem keseimbangan (*system equilibrium*) yang berada pada kondisi alami. Dari perspektif ini, masyarakat secara organik menghasilkan struktur kelembagaan yang mengatur keseimbangan antara aspek internal dan eksternal dari sistem politik. Setiap tuntutan masyarakat diakomodasi oleh lembaga yang bertanggungjawab atas berbagai kepentingan untuk menghasilkan kebijakan yang optimal. Kebijakan inilah yang pada gilirannya meredakan tuntutan dan fungsi dalam menjaga keseimbangan tersebut. Namun, apabila terjadi ketidakseimbangan sistem yang berasal dari kekacauan struktural maka akan menghasilkan keluhan baru, menghasilkan disfungsi patologis

yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Jika kapasitas kelembagaan tidak dapat mengakomodasi masyarakat maka hasilnya adalah frustrasi sosial dan kekacauan politik.³⁷

Menurut Annete Ranko, teori gerakan sosial dapat dibagi menjadi tiga pendekatan yaitu³⁸: Pertama, pendekatan mobilisasi massa, pendekatan mobilisasi memahami gerakan sosial menjadi lebih rasional dan terorganisir melalui tindakan kolektif. Tindakan kolektif memungkinkan sebuah organisasi lebih terstruktur baik dalam taraf formal dan non-formal. Pendekatan ini juga memahami proses suksesi dari keberhasilan mobilisasi massa yang lebih besar. Kedua, Pendekatan *framing*, Pendekatan *framing* dipahami sebagai cara individu bergabung dalam sebuah gerakan yang dipengaruhi oleh doktrin dan ideologi tertentu. Ide-ide primordial dan simbol dari budaya politik tidak selalu diasumsikan secara otomatis bergabungnya individu, tapi diasumsikan sebagai perubahan untuk mendapatkan potensi dari proses mobilisasi. Pemimpin dari gerakan ini biasanya terlibat aktif dalam proses perubahan, tapi dibatasi oleh aktor-aktor lainnya. ketiga, Pendekatan Struktur Peluang Politik, Berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya, yang berorientasi pada tingkat mikro, pendekatan ini mengasumsikan secara lebih luas tentang sebuah gerakan yang terlibat secara struktural dalam lingkungan politik tertentu dan pendekatan ini menganalisa

³⁷ Quintan Wiktorowicz, *Islamic Activism a Social Movement Theory Approach*, (USA: North Morton Street, 2004), 6.

³⁸ Annete Ranko, *The Muslim Brotherhood and its Quest for Hegemony in Egypt: State-Discourse and Islamist-Discourse* (Hamburg: Springer VS, 2015), 21-22.

lebih luas bagaimana sebuah gerakan dapat beradaptasi dalam sebuah lingkungan tertentu.

Pendekatan gerakan sosial yang peneliti gunakan adalah pendekatan struktur peluang politik. Partai FJP dan al-Nahdhah merupakan representasi dari gerakan kelompok islamis. Partai FJP dan al-Nahdhah merupakan partai yang baru dibentuk pasca *Arab Spring*. Partai FJP adalah sayap kanan dari gerakan Ikhwan al-Muslimin sementara partai al-Nahdhah adalah sayap kanan gerakan al-Nahdhah Tunisia. Oleh sebab itu, kedua kelompok ini memiliki akar sejarah panjang, memiliki pengalaman politik dan peran sosial yang kuat puncaknya proses demokratisasi di Mesir dan Tunisia merupakan fase formulasi pada pentas politik nasional.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah, metodologi merupakan cara yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan sebagai cara kerja dalam mengatur prosedur penelitian atau keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu persoalan hingga penelitian itu objektif dan tercapai hasil optimal.³⁹

Menurut jenisnya, model dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memberikan interpretasi terhadap subjek. Hal ini berarti bahwa penelitian kualitatif mengkaji tentang keadaan alami, berusaha memahami atau

³⁹ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 336.

menafsirkan suatu fenomena.⁴⁰ Supaya lebih terperinci, penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan penyajian fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami, ditafsirkan dan disimpulkan.⁴¹ Sebagaimana fokus dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara terperinci kebangkitan partai islamis di Mesir dan Tunisia yaitu *Freedom and Justice Party* (FJP) dan al-Nahdhah dan tingkat keberhasilan pada masing-masing negara. Faktanya fenomena *Arab Spring* adalah pertarungan dan tantangan bagi kalangan islamis menjalani proses demokratisasi, karena demokratisasi adalah momentum kemenangan partai Islam. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pengaruh kemenangan partai FJP dan al-Nahdhah terhadap arah politik dua negara. Fenomena kebangkitan inilah yang berusaha peneliti amati, kaji, pahami dan tafsirkan.

Kategori penelitian ini adalah riset kepustakaan (*library research*) berkaitan dengan kajian teoritis dan ragam referensi dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal dan majalah yang menjelaskan situasi sosial-budaya dan politik yang sedang berkembang. Adapun sumber data peneliti gunakan pertama adalah sumber data primer, yaitu bagian langsung yang berhubungan dengan peristiwa sejarah atau pokok subjek penelitian. Maka sumber primer penelitian ini adalah rujukan-rujukan langsung berupa buku yang memaparkan seputar perkembangan partai Islam di Mesir dan Tunisia pasca-*Arab Spring* 2011-2013. Adapun sumber

⁴⁰ Ujang Suparman, *Qualitative Research For Language Teaching and Learning: Qualitative Inquiry and Research Design* (Bandung: Arvino Raya, 2009), 24.

⁴¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Implikasinya*, Cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 22.

sekunder penelitian berasal dari berbagai analisa dari pengamat, analisa media dan diskusi.

Kategori sumber primer dan sekunder kemudian peneliti rangkai melalui teknik analisis data agar penelitian tersusun secara sistematis melalui penjabaran kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola dari beragam informasi yang peneliti dapatkan dari berbagai sumber. Pertama-tama peneliti akan mengumpulkan data seputar proses *Arab Spring* yang ditandai dengan berhasilnya proses demokratisasi di Mesir dan Tunisia dan peran partai-Islam terhadap suksesi perpolitikan Mesir dan Tunisia. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dan ditafsirkan serta dikategorikan berdasarkan fokus penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian lebih terarah dan mendapatkan gambaran lebih terperinci maka dibutuhkan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang sejarah lahirnya partai islamis di Mesir dan Tunisia. Pada bagian ini, akan dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama, akan membahas historitas dari partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) meliputi doktrin partai

dan platform politiknya. Subbab kedua membahas tentang sejarah partai al-Nahdhah meliputi doktrin dan transformasi arah politik baik sebelum dan sesudah *Arab Spring*.

Bab Ketiga, menjelaskan proses demokratisasi di Mesir dan Tunisia. Pada bagian ini juga dibagi menjadi dua subbab. Subbab pertama membahas tentang proses *Arab Spring* di Mesir dan Tunisia. Subbab kedua, membahas proses demokratisasi dan masa transisi meliputi pemilihan Parlemen, Presiden dan Majelis Konstituante dan pada bagian ini juga akan menjelaskan kemenangan partai islamis FJP dan al-Nahdhah.

Bab Empat, Penjelasan tentang kemenangan kelompok islamis melalui partai FJP dan al-Nahdhah di Mesir dan Tunisia pasca-*Arab Spring* 2011-2013.

Bab Lima merupakan bab akhir dalam penelitian dan dibagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Musim Semi Arab yang melanda Mesir dan Tunisia merupakan representasi dari ketidakpuasan rakyat atas sistem yang dibangun oleh pemerintah yang telah berkuasa puluhan tahun. Rezim yang berkuasa di Mesir dan Tunisia dicirikan dengan otoritarianisme. Media, lembaga pemerintahan dan rakyat dikendalikan dalam sistem yang ketat, masyarakat tidak diberikan kebebasan dalam berekspresi dan lembaga pemerintahan dikuasai oleh lingkaran elit dan keluarga rezim. Akibatnya, kondisi ekonomi dan politik makin rapuh, terjadi pengangguran parah hampir di seluruh negeri. Puncaknya pada tahun 2011, lahir gerakan Massa dari penjuru negeri menuntut agar rezim turun dari kursi jabatan dan mengharapkan kondisi negara yang lebih baik. Rakyat menginginkan demokrasi; kebebasan berekspresi, kesetaraan hak, independensi lembaga hukum dan kebebasan bagi setiap warga negara.

Pasca revolusi di Mesir dan Tunisia, melahirkan proses demokratisasi. Lembaga transisi mempersiapkan draf konstitusi yang menjamin jalannya pemilihan umum yang bebas dan terbuka, setiap masyarakat memiliki kesempatan dalam berpartisipasi dalam pentas politik. Demokratisasi pasca Arab Spring di Mesir dan Tunisia berarti kebebasan setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam memperebutkan suara dalam pemilihan. Proses demokratisasi di Tunisia dan Mesir 2011-2013 melahirkan kekuatan dan aktor baru yang sebelumnya diluar perkiraan.

Kelompok Islamis melalui partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) menguasai parlemen memperoleh kursi mayoritas dan puncaknya Mohammed Morsi (pimpinan partai) terpilih sebagai presiden dari kalangan islamis secara demokratis. Di Tunisia, partai Kebangkitan (*al-Nahdhah*) mendapatkan suara mayoritas pada Majelis Konstituante.

Fenomena kemenangan partai FJP di Mesir dan al-Nahdhah pasca *Arab Spring* 2011-2013 disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: pertama, kemenangan partai FJP dan al-Nahdhah karena gerakan kelompok islamis telah menakar kuat di tengah masyarakat melalui lembaga sosial. Di Mesir, untuk memperkuat pengaruhnya dalam masyarakat, Ikhwan al-Muslimin memperluas jaringan melalui lembaga kesehatan, lembaga pendidikan dan organisasi mahasiswa. Penetrasinya di tengah masyarakat mampu mendongkrak suara dan popularitas dari partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) sayap kanan Ikhwan al-Muslimin. Sementara di Tunisia, gerakan al-Nahdhah merupakan gerakan yang populer dengan metode *tabligh*, organisasi mahasiswa dan lembaga sosial menjadikan al-Nahdhah mendapatkan dukungan luas masyarakat. Kedua, Moderasi, partai FJP dan al-Nahdhah mengusung platform yang dapat menarik semua kalangan dan mengusung moderasi dalam menarik simpati masyarakat. Moderasi partai FJP dan al-Nahdhah diwujudkan melalui penerimaannya terhadap konsep hak asasi manusia, kebebasan dan menerima nilai-nilai demokrasi sebagai landasan negara. Selain itu, secara struktural, partai FJP tidak hanya dipegang oleh kalangan IM, tapi posisi strategis dipegang oleh Kristen Koptik, FJP juga memberikan ruang bagi perempuan dalam partisipasi politik dan menjabat dalam struktur pemerintah. Ketiga, oportunisme politik, partai FJP dan al-Nahdhah

merupakan sayap gerakan islamis yang telah mapan dalam pentas politik nasional, pasca revolusi Mesir dan Tunisia masih lemah, rakyat tidak percaya pada aktor-aktor lama, sehingga momentum ini dimanfaatkan dengan membentuk koalisi partai. Partai FJP tergabung dalam Aliansi Demokrasi, terdiri dari kalangan sekuler dan liberal. Sementara partai al-Nahdhah tergabung dalam aliansi Troika sayap politik sekuler dan liberal. Langkah ini untuk memperoleh simpatisan dari kalangan sekuler, ditengah kekhawatiran atas dominasi kalangan islamis.

B. Saran

Penelitian ini berusaha mengungkapkan beberapa aspek dari kebangkitan kelompok islamis melalui partai FJP Mesir dan al-Nahdhah Tunisia pada proses demokratisasi pasca *Arab Spring* 2011-2013. Ada beberapa penelitian lain yang belum dikaji terkait dengan kelompok islamis lainnya, bukan hanya di Mesir dan Tunisia. fenomena lain dari bangkitnya partai islamis adalah kemenangan partai dengan corak konservatif dari kalangan Salafi. Penelitian tentang kebangkitan islamis di negara-negara Arab menarik untuk dikaji lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Al-Anani, Khalil. *Inside The Muslim Brotherhood: Religion, Identity, and Politics*. New York: Oxford University Press. 2016.
- Akbarzadeh, Sahram. Fethi Mansouri, *Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in The West*. New York: I.D Touris & Co Ltd. 2007.
- Allani, Alaya "The Islamists in Tunisia between confrontation and participation: 1980–2008", *The Journal of North African Studies*, 14:2 (2009).
- Ali, As'ad Said. *Al-Qaida: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*. Jakarta: LP3ES. 2014.
- Alin, Hurin Hayatin Kondisi Mesir tahun 2011-2012 dan Reaksi Dunia Pasca Runtuhnya Rezim Mubarak Karena Revolusi Mesir 2011, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol 5, No. 1 Februari 2016.
- Amal, Taufik Adnan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet. 2004.
- Angrist, Michele Penner "Understanding the Success of Mass Civic Protest in Tunisia" *Middle East Journal*, Vol. 67, No.4 2013.
- Arafat, Alaa Al-Din. *The Rise of Islamism in Egypt*. Switzerland: Palgrave Macmillan. 2017.
- Avina, Jeffrey "The Evolution of Corporate Responsibility (CSR) in the Arab Spring" *Middle East Journal*, Vol. 67, No.1 2013.
- Bayat, Asef. 2011. *Post-Islamisme*, Pentj. Faiz Tajul Milah. Yogyakarta: LkiS.
- . *Islam and Demokrasi: What is The Real Question?* Amsterdam: Amsterdam University Press. 2007.
- Beinin, Joel. *Workers and Thieves: Labor Movements and Popular Uprisings in Tunisia and Egypt*. California: Standford University Press. 2016.

Brennan, Christopher L. *Fall of The Arab Spring From Revolution to Destruction*. San Diego: Progressivpress. 2015.

Burdah, Ibnu. *Menuju Dunia Baru Arab: Revolusi Rakyat, Demokratisasi, dan Kekuasaan* Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013.

——— “Ittijah Jadidah Li Ahzab al-Islamiyyah fi Dual al-‘Arabi, *Journal A-Jami’ah*, Vol. 52, No.2, 2014.

Cammett, Melani Claire. *Globalization and Business Politics in Arab North Africa : A Comparative Perspective*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2007.

Cankorel, Turgut and Lara Aryani, “A Spectrum of Regulations: Mobile Telecom Regulation in the Middle East and North Africa,” *Convergence* 5 (2009).

Diana, Rashda. “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam”, *Jurnal Tsaqafah*, Vol.13, No.I, Mei 2017.

Dulton, Rossel J. Doh C. Shin, Willy Jou, *Understanding Democracy: Data from Unlikely Places*, Vol.18, No.4 October 2007.

Esoposito, John L. Lily Zubaidah Rahim, Nasir Ghobazadeh. *The Politics of Islamism: Diverging Visions and Trajectories*. Switzerland: Palgrave Macmillan. 2017.

Esposito, John L. Tamara Sonn, John O. Voll. *Democracy After Arab Spring*. New York: Oxford University Press. 2016.

Fahmi, Dalia F. Daanish Faruqi, *Egypt and the Contradictions of Liberalism: Illeberal Intelligentsia and the Future of Egyptian Democracy*. England: Oneworld Publications. 2017.

Fergany, Nader. *Arab Revolution In The 21St Century: Lessons From Egypt and Tunisia*. New York: Ppalgrave Macmillan. 2016.

Fisher, Kristen J. Robert Stewart. *Transitional Justice and The Arab Spring* New York: Reutledge. 2014.

- Ghafur, Muhammad Fakhry Agama dan Demokrasi: Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya, Jurnal Penelitian Politik, Vol.11, No.2 Desember 2014.
- Ghobadzadeh, Naser. *A Theological Challenge to the Islamic State* New York: Oxford University Press. 2015.
- Gunderson, Cory. *Islamic Fundamentalism*. United State: Abdo Pub Co. 2004.
- Hamid, Shadi William McCants. *Rethinking Political Islam*. New York: Oxford University Press. 2017.
- Hashmi, Sohail H. *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, adn Conflict*. Princeton: Princeton University Press. 2002.
- Hass, Mark L. David W. Lesch. *The Arab Spring: Change and Resistance in the Middle East*. United State, Westview Press. 2017.
- Hullen, Vera Van EU. *Democracy Promotion and The Arab Spring: International Cooperation and Authoritarianism*. New York: Palgrave Macmillan. 2015.
- Husain, Nazir. "Unrest and Revolt in the Arab World: Impact on Regional Security", Pakistan Institute of International Affairs, Vol. 64, No.3 Juli 2011.
- Ismail, Salwa. *Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism*. New York: I.B Tauris. 2006.
- Iqbal, Muhammad Amin, Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Jamshidi, Maryam. *The Future of the Arab Spring: Civic Enterpreneurship in Politics, Art, and Technology Sturtups*. United State: Elsevier. 2014.
- Jeribi, Ahmed "Mohamed Fakhfekh, Anis Jarboui, "Tunisian Revolution and Stock Market Volatility: Eviddence From FIEGARCH Model"Emerald Group Publishing, Vol. 41, No. 10, 2015.
- Kamrava, Mehran (Editor). *Beyond The Arab Spring: The Evolving Ruling Bergaining in the Middle East*. New York: Oxford University Press. 2014.
- Kechley, Neil. *Egypt in a Time of Revolution: Contentious Politics and the Arab Spring*. United Kingdom: Cambridge University Press. 2017.

- Khatab, Sayed Gary D. Bouma. *Democracy in Islam*. New York: Routledge. 2007.
- Kisaichi, Masatoshi. *Popular Movement and Democratization in Islamic*. World USA: Routledge. 2016.
- Lynch, Marc Susan B. Glasser. Bike Hounshell, *Revolution in Arab World: Tunisia, Egypt, and The Unmaking of An Era* New York: Foreign Policy. 2011.
- Marzouki, Nadia "From People to Citizens in Tunisia" Middle East Report: The North Africa: The Political Economy of Revolt, diakses melalui: <http://about.jstor.org/terms>.
- Muasher, Marwan. *The Second Arab Awakening And the Battle for Pluralism*. New Haven and London: Yale University Press. 2014.
- Murphy, Emma C. *Economic and Political Change in Tunisia: From Bourguiba to Ben Ali*. New York: Martin Press Inc, 1999.
- Perkins, Kennet. *A History of Modern Tunisia*, Second Edition. New York: Cambridge University Press. 2015.
- Perra, Antonia. Between Expectations and Reality: The Arab Spring in Egypt, HEMISPHERES, Vol.29, No.2, 2014.
- Ragab, Eman "Islamic political party in Egypt: An overview of positions on human right and developmen and opportunities for engagement", Al-Ahram Center for Political aand Strategic Studies (ACPSS), May 2012.
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Ranko, Annete. *The Muslim Brotherhood and its Quest for Hegemony in Egypt: State-Discourse and Islamist Counter-Discourse*. Germany: Springer VS. 2015.
- Ratna, Nyoman Kutha. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Ruedy, John. *Islamism and Seculatism in North Africa*. United State: Palgrave Macmillan. 1996.

- Ruthenford, Bruce K. *Egypt after Mubarak: Liberalism, Islam, and Democracy in the Arab World*. United Kingdom, Princeton University Press. 2013.
- Sadiki, Larbi. *Handbook of the Arab Spring: Rethinking Democratization*. New York: Routledge. 2011.
- Saikal, Amin Albrecht Schnabel. *Democratization in the Middle East: Experiences, struggles, challenges*. USA: United Nations University Press. 2003.
- Schaar, Stuart "Arab Dictatorship under Fire in the New Information Age" *Economic and Political Weekly*, Vol. 46, No.6 Februari 2011.
- Shahin, Emed El-Din The Egyptian Revolution: The Power of Mass Mobilization and the Spirit of Tahrir Square, *Journal of the Middle East and Africa*, Vol.3: 46-69, 2012.
- Suparman, Ujang. *Qualitative Research For Language Teaching and Learning: Qualitative Inquiry and Research Design* (Bandung: Arvino Raya. 2009.
- Syazali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta, UI Press. 2011.
- Tamimi, Azzam S. *Rashid Ghannouchi: A Democrat within Islamism*. New York: Oxford University Press. 2001.
- Teti, Andrea. "Political Party and Movement in Post-Revolutionary Egypt", *Institute Per Gli Studi Di Politica Internaionale (ISPI) No.42*, Oktober 2011.
- Tranggono, Eko. "Islam dan Demokrasi: Upaya Mencari Titik Temu", *Jurnal Al-Afkar*, Edisi VI, Juli-Desember 2002.
- Voll, John Obert. *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Modern* Pentrj. Ajat Suderajat. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1997.
- Volpi, Frederic. *Political Islam: A Critical Reader*. New York: Routledge. 2011.
- Wangke, Humphry "Masyarakat Sipil dan Transisi Demokrasi di Timur Tengah", *P3DI Setjen DPR RI.*, Vol.VI, No.3 Februari 2014.
- Wiktorowicz, Quintan. *Islamic Activism a Social Movement Theory Approach*. USA: North Morton Street. 2004.

Yasmine, Shafira Inanda "Arab Spring: Islam Dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi Timur Tengah", jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik .,Vol.28, No.2, (2015).

Referensi dari Internet

David D. Kirkpatrick, "Islamists Win 70 % of Seats in the Egyptian Parliament", dalam <http://www.nytimes.com>.

Abdel Rahman Hussein, "Muslim Brotherhood's: Mohammed Morsi declared president of Egypt: Egyptians celebrate while neighbours with guarded optimism to appointment of first elected Islamist candidate", dalam <https://www.theguardian.com>,

"Tunisia's Islamist Ennahda party wins historic poll", dalam <http://www.bbc.com/news/world-africa>,

Duncan Pickard, "Electoral Politics Under Tunisia's New Constitution, Rafik Hariri Center for the Middle East: Atlantic Council", dalam https://www.files.ethz.ch/isn/166942/tunisia_new_constitution_dpickard.pdf,

Ugur Komecoglu, *Islamism, Post-islamism and Civil Islam*, diakses melalui: <https://www.hudson.org>.

Shadi Hamid, "Political Party Developmental Before and After TheArab Spring", diakses melalui: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Beyond-the-Arab-Spring>.

Lorenzo Vidino, "The Muslim Brotherhood after the Arab Spring: Tactics, Challenges and Future Scenarios", Center for European Studies, May 2013. 3.

The Tahrir Institute for Middle East Policy, "Freedom and Justice Party" diakses melalui: <https://timep.org/pem/political-parties/freedom-and-justice-party>.

Hizbul Hurriyah wal-‘Adalah, diakses melalui: <http://www.aljazeera.net>.

Athul Battarai dkk, "Engaging With the Freedom and Justice Party: Protecng American National Security Interests in Post-Arab Spring", Institute of Politics, X.

Said Shehata, "Profile: Egypt's Freedom and Justice Party," BBC News, November 25, 2011, <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15899548>.

<http://www.middleeasteye.net/news/ennahda-leader-gannouchi-we-are-muslim-democrats-not-islamists>.

Aras. Gor. Ismail Kurun, Democratisation in Egypt From A Historical Perspective: Problems, Pitfalls and Prospect, Yonetim Ve Ekonomi, (2015), 189. Diakses melalui: <http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C22S12015/183-199.pdf>.

The Carter Center, "Final Report of The Carter Center Mission to Witness the 2011-2012 Parliamentary Election in Egypt" diakses melalui: https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/egypt-2011-2012-final-rpt.pdf.

Ben Wedeman, Richard Allen Greene, "Election Day: Finally, Egypt is born" diakses melalui: <https://edition.cnn.com/2012/05/23/world/africa/egypt-elections/index.html>.

<https://egyptward1.weebly.com/el-ghad-party.html>.

Australian Government, Country Advice Egypt, diakses melalui: <https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2013/06/11/Al-Ghad%20Party.pdf>.

<https://www.arabwestreport.info/sites/default/files/pdfs/alwafd>.

Hafez Ghanem, "Egypt Difficult Transition: Option for the International Community" diakses melalui: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/07/Chapter-One-29.pdf>.

Nabil Fahmy, Egypt Elections: National Progressive Unionist (Al-Tagammu) Party, diakses melalui: <https://www.thecaireview.com/tahrir-forum/egypt-elections-national-progressive-unionist-al-tagammu-party>.

<http://english.ahram.org.eg/NewsContent/33/104/24939/Elections-/Political-Parties/Freedom-and-Justice-Party.aspx>.

Andrea Teti, "Political Party and Movement in Post-Revolutionary Egypt" diakses melalui: https://www.ispionline.it/it/documents/WP42_2011ok.pdf.

- Andrea Tetti, "Political Parties and Movements in Post-Revolutionary Egypt" diakses melalui: https://www.ispionline.it/it/documents/WP42_2011ok.pdf (20 Juni 2018)
- Emad El-Din Shahin, "Political Islam in Egypt" diakses melalui: <http://aei.pitt.edu/11728/1/1495.pdf>.
- Issander Eel Amrani, "Final results for Egypt's parliamentary elections" diakses melalui: <https://arabist.net/blog/2012/1/22/final-results-for-egypts-parliamentary-elections.html>.
- Tomas Schiller, "Tunisia-A Revolution and Its Consequences" diakses melalui: http://www.kas.de/wf/doc/kas_22802-544-2-30.pdf.
- Maria Cristina Paciolo, "Tunisia: Changes and Challenges of Political Transition" Mediteranian Prospect Technical Report 2011, diakses melalui: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2000658.
- Shelly Culberston, "Tunisia Is an Arab Spring Success Story", diakses melalui: <http://observer.com/2016/04/tunisia-is-an-arab-spring-success-story/>.
- Iman Zekri, "Dictatorships to Democracies: The Democratic Progress of Tunisia and Egypt Following the Arab Spring" The FGCU Student Research Journal diakses melalui: https://www.fgcu.edu/Aquila/files/Zekri_Dictatorships_to_Democracies.pdf.
- Isabel Schafer, "The Tunisian Transition: Torn Between Democratic Consolidation and Neo-Conservatism in an Insecure Regional Context" European Institute of the Mediterranean, Augus2015, melalui: https://www.diegdi.de/uploads/media/Tunisian_Transition_Paper_25_Isabel_Schaefer.pdf
- Laurel L. Miller dkk, "The Regime Transition in Tunisia and Emerging Challenges", Rand Corporaton, 59. diakses melalui: <http://about.jstor.org/terms>.
- Maya Yahya, "Tunisia An Arab Anomaly" diakses melalui: <http://carnegie-mec.org/2018/01/09/tunisia-arab-anomaly-event-5779>.
- Mary Cary, "Transition in Tunisia: A Post-Arab Spring Democracy" diakses melalui: <http://fordhampoliticalreview.org/transition-in-tunisia-a-post-arab-spring-democracy>.

Yahya H. Zoubir, "The Democratic Transition in Tunisia: A Success Story in the Making Era" diakses melalui: <http://www.accord.org.za/conflict-trends/democratic-transition-tunisia>.

Canadian for Justice and Peace in the Middle East, diakses melalui: http://www.cjpme.org/fs_139.

Leila Fadel, "First free election in Tunisia brings joy and pride", diakses melalui: <https://www.washingtonpost.com/world/middle-east/first-free-election-in-tunisia-brings-joy-and-pride/2011/10/23>.

Angelina Chrisafis, "Tunisian election: the key parties: diakses melalui: <https://www.theguardian.com/world/2011/oct/19/tunisia-elections-the-key-parties>.

Anne Wolf, "The Future of Tunisia's Nidaa Tounes Party", diakses melalui: <http://www.mei.edu/content/at/future-tunisias-nidaa-tounes-party>.

Yahia H. Zoubir, "The Democratic Transition In Tunisia: A Success Story in the Making" diakses melalui: <http://www.accord.org.za/conflict-trends/democratic-transition-tunisia>.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Lalu Wahyu Putra Utama
Tempat Tgl. Lahir : Jembe Barat, 3 Juli 1993
Alamat Asal : Jln. Ganti Montong Gamang, Jembe Barat, Saba,
Janapria Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
Alamat Domisili : Demangan Baru, GkI/233, Yogyakarta
No. Hp : 085333939850
Email: : Wahyuputrautama786@gmail.com
FB : Wahyu Putra Utama

B. Riwayat Pendidikan

1999-2005 : SDN 2 Jembe Barat, Lombok Tengah, NTB
2005-2008 : MTs.N 2 Janapria, Lombok Tengah NTB
2008-2011 : MA. DI Putra Nurul Hakim, Lombok Barat
2011-2015 : UIN Sunan Kalijaga, Prodi Bahasa dan Sastra Arab,
Fak. Adab dan Ilmu Budaya

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga 2012-2015.
2. Himpunan Mahasiswa NW Yogyakarta 2017-Sekarang

D. Karya Tulis Ilmiah

1. Intervensi Amerika Serikat Terhadap Arab Kebijakan Arab Saudi Dalam Konflik Yaman Pasca Arab Spring 2011-2016. Jurnal Indonesia Center of Middle East Studies 2017.
2. Timur Tengah Pasca-Arab Spring dan Dampaknya Terhadap Konstelasi Gerakan Kelompok Radikal di Asia Tenggara (Dibukukan) Cetakan Pertama, Januari 2018 dengan judul Isu-isu Aktual Seputar Islam Global.

E. Tulisan Lain:

1. Fiksi

- a. Dalam Bayang-bayang Gelap
- b. Aku, Dia dan Kereta

2. Non-Fiksi

- a. Menakar Peran NGOs Indonesia dalam Menangani Krisis Kemanusiaan di Timur Tengah
- b. Kecamuk di Ghouta Timur: Antara Humanisme dan Strategi
- c. Arab Saudi, Modernisasi dan Wacana Islam Moderat (Geotimes)
- d. Kecamuk di Ghouta Timur: Antara Humanisme dan Strategi Perang (Geotimes)
- e. Nasib Zaini Misrin dan Potret Hubungan Indonesia-Arab Saudi
- f. Bara Api di Ghouta Timur
- g. Mengenal Khaizuran: Ratu yang Berasal dari Budak
- h. Mengenal Sitt al-Mulk (Dinasti Fatimiyah): Perempuan dalam Khazanah Islam Abad Pertengahan
- i. Jalan Terjal Perundingan Astana
- j. Menanti Hasil Akhir Perundingan Astana
- k. Embrio ISIS di Mesir dan Ujian Berat Abdel Fattah al-Sisi
- l. Konflik Yaman: Dominasi Houthi dan Blokade Arab Saudi
- m. Bangkitnya Gerakan Anti-Pemerintah di Iran
- n. Indonesia dalam Pusaran Radikalisme
- o. Rekonsiliasi Hamas-Fatah; Apa Setelannya?
- p. Akar Gerakan, Doktrin, dan Strategi Politik Hamas
- q. Islam dan Peradaban: Telaah Peradaban Saintifik Islam
- r. Pengaruh Konflik Yaman terhadap Situasi Sosial dan Politik Regional